

**PROGRAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DAN PENGEMIS
DI KOTA BATU
(Studi di Dinas Sosial Kota Batu)**

SKRIPSI

Dianjukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH:

TRY SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

NIM: 2017210212

**KOSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2021

RINGKASAN

Pendidikan sangat penting untuk masyarakat dan tingkatkan kualitas hidup rakyat. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 warga negara layak dapatkan pendidikan. Namun yang terjadi sekarang adalah masih banyak anak yang harus mengenyam pendidikan namun di Kota Batu masih banyak anak yang tidak sekolah karena sesuai Dinsos Kota Batu dari tahun 2010 hingga 2020 sebanyak 70 orang, berkeliaran di jalanan. Dari jumlah tersebut, kategorinya adalah 8 sampai 19 tahun, tidak bersekolah, bekerja sebagai pengamen, pengemis. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Cara mengumpulkan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan hasil penelitian di Dinas Sosial Kota Batu dari empat kegiatan yaitu komunikasi, sumber daya, komitmen, struktur birokrasi. Faktor pendukung rehabilitasi daerah, (UPT), sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat internal belum memiliki rumah singgah, Kota Batu belum memiliki peraturan daerah. Faktor penghambat eksternal adalah kurangnya kesadaran anak jalanan, pengemis dan kurangnya perhatian dari keluarga dan lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Penanggulangan, Anak Jalanan, Dan Pengemisi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara berkembang yang mempunyai masyarakat dan mempunyai masalah kesejahteraan sosial cukup tinggi adalah Indonesia. Agar terwujudnya suatu kesejahteraan sosial sesuai dengan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, yang sudah diamanatkan dalam lindungan segenap bangsa serta tumpah darah dalam menjalankan perdamaian dan kemakmuran bagi anak-anak kesejahteraan dan kemakmuran, hingga masih belum terselesaikan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah (Immanuel Jaya, 2019).

Salah satu unsur yang paling terpenting di dalam pembangunan dan agar masyarakat tetap maju dan sejahtera adalah pendidikan. Pendidikan adalah cara agar tingkatkan kualitas SDM. Agar tingkatkan kualitas hidup maka dibutuhkan pendidikan yang bagus. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa warga negara punya hak mendapatkan pendidikan, selanjutnya Pasal 31 ayat 3 mengatakan bahwa setiap warga negara punya hak dalam pendidikan layak serta ketakwaan. Menurut (Abdul Syaban, 2019) mengatakan bahwa pemenuhan pendidikan sangat sulit dan tidak berjalan secara seragam dan macam-macam jenis pendidikan formal dan gunakan seragam dan kurikulum yang ditentukan skala nasional sehingga masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan.

Perwali kota Batu Nomor 94 Tahun 2020 Pasal 26 ayat 6 perda Kota Batu No 17 Tahun 2011 mengenai sistem pendidikan menyebutkan bahwa setiap

anak berhak mendapatkan pelatihan dan pendidikan dalam suatu pengembangan pribadi dan berikan pendidikan gratis sesuai ayat 3 dan undang-undang yang berlaku. Namun banyak masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan karena ekonomi yang sangat rendah (Maria Agnes Dewi, 2020).

Namun banyak anak jalanan yang butuh perhatian pemerintah agar kita tetap menemukan mereka, terutama anak usia sekolah, di jalanan. Khusus di Kota Batu, berdasarkan Dinas Sosial Kota Batu, dari tahun 2010 anak jalanan dan pengemis sampai 112 hingga tahun 2020 ada 70 anak jalanan yang berkeliaran di jalanan, seperti lampu merah, alun-alun, pasar, dan tempat lainnya. Dari jumlah tersebut, kategorinya berusia 8 sampai 19 tahun, tidak bersekolah, bekerja sebagai pengamen, pengemis, pemulung dan penjual (Suhardin, 2013).

Pemerintah dalam menangani masalah sosial termasuk anak jalanan dan pengemis yang semakin hari semakin banyak di kota wisata Batu, Aparatur Dinas Sosial Kota Batu didorong dengan Peraturan Menteri Sosial No 11 Tahun 2018 tentang (PMKS) penanganan masalah kesejahteraan sosial, gelandangan, anak jalanan, balita. diharapkan dapat meminimalkan masalah sosial. Itu sebabnya anak jalanan dan pengemis sudah diserahkan Satpol-PP ke Dinas Sosial Kota Batu. Dinsos Kota Batu akan merehabilitasi anak jalanan dan pengemis dengan tujuan Rehabilitasi agar anak jalanan dan pengemis dapat belajar untuk memperoleh informasi, pengetahuan, wawasan dan bimbingan serta pendidikan. Namun, Dinas Sosial Kota Batu belum memiliki tempat khusus untuk rehabilitasi anak jalanan dan pengemis. Untuk sementara, penampungan pengemis dan anak jalanan akan dikirim ke UPT Pemprov Jatim di Sidoarjo (Malang Times, 2020).

Dilihat dari beberapa masalah diatas maka peneliti dalam hal ini mengangkat judul penelitian **Program Penanggulangan Anak Jalanan Dan Pengemis Di Kota Batu.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Program Penanggulangan Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Batu?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Program Penanggulangan Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Program Penanggulangan Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Batu.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Program Penanggulangan Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis.

1. Manfaat Akademis

Agar tambah wacana keilmuan dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai Program Penanggulangan Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmu pengetahuan mengenai Program Penanggulangan Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Batu. Dan dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armita Pipin. 2016. *Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Dengan Teori Self Estem*. Yogyakarta.
- Darwis, Samin Rumzi, Fitri, Ningsih Kurnia. 2020. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karimun*. Karimun: Jisip.
- Dewi, Maria Agnes. 2021. *Peraturan Walikota Batu Nomor 94 Tahun 2020*. (<https://jdih.batukota.go.id>, Diakses-30 September-2020).
- Jaya, Imanuel. 2019. *Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila Dan Anak Jalanan Di Kota Pelangka Raya*. Pelangka Raya: Jispar.
- KBBI. 2007. *Eksplorasi Anak Oleh Orang Tua*. (<https://dspace.uui.ac.id>, Diakses-12 November 2007)
- Leo Agustino. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Muiz, Ahmad. 2021. *Dinas sosial kota batu* (<https://Dinsos.BatuKota.go.id>, Diakses-Juni 2021).
- Miles, Huberman, Saldana Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Sage.
- Moleong, Lexy, J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution Chairikka, Thamrin. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan*. Medan: Publikauma.
- Ratri, Nurlayla. 2020. *Didominasi Dari Luar Daerah Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial Tersebut Bertambah Di Kota Batu*. 2020. (<https://batu.jatimtimes.com/baca/210675/20200312/095800>, Diakses-25-November-2020).

- Riant Nugroho. 2009. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Syaban, Iru, Asuru Arsidik. 2019. *Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pendidikan Non Formal Pada Anak Jalanan Di Kota Kendari*. Kendari: Selami Ips.
- Suhardin, Suprojo Agung, Bagus Nanang. 2013. *Peran Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pembinaan Anak Jalanan*. Kota Batu: Jisip.
- Suyanto Bagong. 2013. *Masalah sosial anak edisi revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo Joko. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: MNC.
- Winarno Budi. 2015. *Kebijakan Publik (Teori Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.